

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia terdiri atas daratan, lautan, dan pegunungan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Selain kekayaan alam, Indonesia juga negara kaya akan keanekaragaman yang terdiri atas keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keanekaragaman itu memberikan identitas yang unik bagi setiap daerah di Indonesia sehingga wajib untuk dilestarikan. Adanya keberlimpahan kekayaan alam yang indah dan keberagaman yang dimiliki Indonesia, menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara zamrud khatulistiwa (Sekretariat Nasional Indonesia ASEAN, 2020). Kekayaan alam yang indah dan beranekaragam di Indonesia merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata.

Pariwisata adalah salah satu industri yang bisa memajukan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara (Nurlina et al., 2021). Dalam proses pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, industri pariwisata memegang peranan yang signifikan. Di beberapa lokasi, industri pariwisata telah terbukti mampu menjadi sumber utama pendapatan serta mampu mengatasi kemiskinan (Alam & Faizal, 2021). Dalam mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD), industri pariwisata memainkan peran utama dengan masih memperhitungkan beberapa aspek yang memengaruhinya, seperti jumlah destinasi wisata, jumlah kunjungan wisatawan

domestik dan internasional, serta tingkat hunian hotel (Alam & Faizal, 2021).

Di Indonesia, pariwisata masuk dalam salah satu objek prioritas dalam agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Hasibuan et al., 2023). Pariwisata menjadi sektor yang menjadi andalan sebagai pilihan alternatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan segala perannya. Beragam peran pariwisata tersebut diantaranya dalam bentuk kontribusinya terhadap: penerimaan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), dan penyerapan tenaga kerja (Nugroho, 2020). Selain berguna sebagai alat untuk mendongkrak pekonomian, pariwisata dianggap mampu juga dalam mengatasi angka pengangguran (Aliansyah & Hermawan, 2021).

Peran pariwisata yang begitu besar bagi negara Indonesia tidak luput dari adanya peraturan sebagai payung hukum untuk upaya pengembangan yang jelas dan terarah. Payung hukum tersebut adalah melalui peraturan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terutama pada pengembangan wisata di daerah. Hal tersebut, sesuai pada pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yaitu Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah ini juga tidak luput dari adanya sistem otonomi daerah di negara Indonesia. Adanya otonomi daerah, membuat setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Dalam hal ini, pariwisata masuk dalam salah satu urusan

pemerintahan pilihan yang konkuren dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dari hal itu, pemerintah daerah berperan dan mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata daerah. Adanya pariwisata daerah, dapat digunakan sebagai promosi daerah karena dapat memperkenalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat mengangkat perekonomian daerah dan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu daerah yang mempunyai potensi pariwisata yaitu Kabupaten Tuban yang terkenal sebagai Kota Bumi Wali dan Kota Seribu Goa. Kabupaten Tuban adalah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Tuban sangat strategis karena letaknya berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yang dilintasi Jalan Nasional Deandels di wilayah utara dekat pantai. Kabupaten Tuban memiliki luas daratan 1.839,94 km² dan luas lautan 22.608 km² (Kabupaten Tuban, 2020). Posisi Kabupaten Tuban termasuk dalam posisi kaya akan potensi alam karena terdapat perairan dan daratan dalam satu kota.

Kabupaten Tuban yang memiliki potensi alam yang indah dan nilai sejarah di dalamnya dapat dikembangkan sebagai tempat wisata. Adapun tempat wisata di Kabupaten Tuban seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Tempat Wisata Menurut Kecamatan dan Jenis Wisata di Kabupaten Tuban Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Museum Mosque	Pemandian Bathing Place	Goa Cave	Air Panas Hot water	Panorama Panorama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kenduruan	-	1	-	1	-
Bangilan	-	1	-	1	-
Senori	-	-	-	-	-
Singgahan	-	1	-	-	1
Montong	-	3	1	-	-
Parengan	-	1	-	1	-
Soko	-	4	-	-	2
Rengel	-	2	1	-	-
Grabagan	-	-	-	-	1
Plumpang	-	1	-	-	-
Widang	-	-	-	-	-
Palang	-	2	-	-	1
Semanding	-	4	-	-	1
Tuban	1	2	1	-	-
Jenu	-	1	-	-	5
Merakurak	-	7	-	-	-
Kerek	-	1	-	-	-
Tambakboyo	-	-	-	-	-
Jatirogo	-	-	-	-	-
Bancar	-	1	-	-	1
Tuban	1	32	3	3	12

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2023

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki jumlah tempat wisata yang terdiri dari museum, pemandian, goa, air panas, dan panorama. Jumlah tempat wisata tersebut tergolong dalam jumlah yang cukup banyak sehingga wisatawan dapat menikmati wisata di banyak tempat. Adapun jumlah wisatawan yang terdiri dari domestik dan mancanegara yang ada di Kabupaten Tuban ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2022

Tahun Years	Wisatawan Visitors		Jumlah Total
	M mancanegara International	Domestik Domestic	
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	774	6 965 561	6 966 335
2019	793	7 033 343	7 034 136
2020	283	2 896 170	2 896 453
2021	7	3 413 900	3 413 907
2022	35	6 124 619	6 124 654

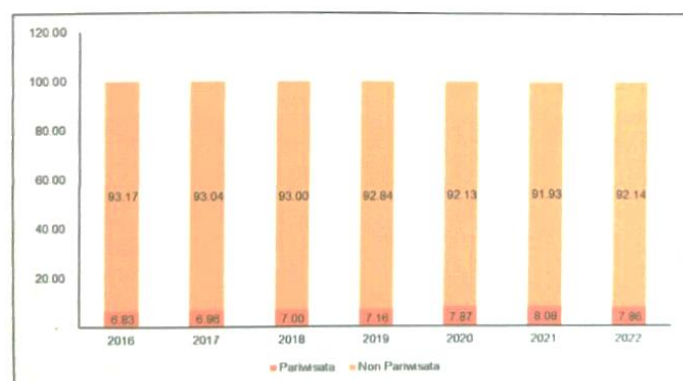
Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2023

Adanya beberapa jenis tempat wisata di Kabupaten Tuban memberikan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Akan tetapi, dari

tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengunjung wisata yang melakukan kunjungan ke objek wisata di Kabupaten Tuban, dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimulai tahun 2018 s.d 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal itu disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, tetapi jumlah wisatawan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022. Adapun jumlah total pengunjung wisata di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6.124.654 orang. Di mana jumlah wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik yaitu sebanyak 6.124.619 wisatawan di tahun 2022. Hal itu, menunjukkan tren positif mengenai jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tuban.

Jumlah kunjungan tersebut 98% hampir memenuhi target jumlah wisatawan yang ditargetkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban dengan target jumlah kunjungan pada tahun 2022 sebanyak 6.209.633 orang dan terealisasi sebesar 6.124.654 orang (Renja Disbudporapar Kabupaten Tuban, 2023). Meskipun jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Tuban sudah hampir memenuhi jumlah yang ditargetkan, akan tetapi jumlah tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tuban. Hal itu bisa dilihat dari data gambar

Gambar 1. 1 Kontribusi Bidang Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2023 (Diolah)

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa PDRB sektor pariwisata Kabupaten Tuban masih tergolong sangat rendah dibanding dengan sektor lain. Masih rendahnya kontribusi PDRB dari sektor pariwisata tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang pariwisata. Di mana, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka PDRB juga akan mengalami peningkatan seiringnya (Aghniya et al., 2016). Adapun jumlah PAD sektor pariwisata Kabupaten Tuban ada pada tabel di bawah.

Tabel 1. 3 Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Pariwisata Kabupaten Tuban

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2019	Rp 2.145.326.500
2020	Rp 764.000.000
2021	Rp 6.132.000.000
2022	Rp 11.767.272.608
2023	Rp 17.720.860.435

Sumber : Tugujatim, Wartakini, dan Disbudporapar Kabupaten Tuban, 2024

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pariwisata di Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi dari tahun 2019 ke tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Namun, jumlah ini berkontribusi sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semua bidang di Kabupaten Tuban. Sedikitnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari rendahnya presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang pariwisata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri memiliki peran krusial dalam mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dengan fokus pada kemajuan lintas sektor, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil di seluruh wilayah (Septyana Putra et al., 2021). Akan tetapi, melihat rendahnya kontribusi PAD bidang pariwisata di Kabupaten Tuban membuktikan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Tuban belum optimal. Rendahnya kontribusi PAD tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kecilnya sumbangan pendapatan dari tempat rekreasi yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah pengunjung objek wisata. Untuk mengembangkan pariwisata tersebut, diperlukan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata perlu sebuah pendekatan strategis dengan rencana dan struktur yang terorganisir dalam pengembangan sektor pariwisata agar potensi yang ada dapat dikembangkan dengan optimal (Nur & Lituhayu, 2022).

Adapun kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tuban yang digunakan sebagai usaha untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tuban yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dari hal itu, fokus kebijakan dalam

pengembangan pariwisata ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037.

Kebijakan tersebut menjadi dasar dan pedoman dalam pengembangan pariwisata Di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada objek wisata Goa Akbar. Pemilihan lokasi tersebut dilandaskan pada objek wisata Goa Akbar yang termasuk dalam salah satu dari tiga objek wisata yakni Boom Tuban dan Pemandian Bektiharjo sebagai tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata (Radar Tuban, 2023).

Alasan pemilihan lokasi tersebut juga didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, bahwa dalam peraturan tersebut di bagian umum menjelaskan mengenai sumbangan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata berupa tempat rekreasi Kabupaten Tuban masih kecil. Terdapat objek wisata potensial antara lain Air Terjun Nglirip, Pantai Sowan, Sumber Air Prataan, Wisata Alam Nganget, Goa Suci dan Goa Putri Asih, namun tidak bisa dipungut pendapatannya karena objek wisata tersebut berada di bawah kewenangan Perhutani Divre II Jawa Timur. Beberapa objek wisata juga tidak bisa memberi kontribusi pendapatan Daerah karena dikelola Pemerintah Desa yakni Pemandian Belerang Dermawuharjo di Kecamatan Grabagan, dan Goa Ngerong Kecamatan Rengel. Sedangkan untuk makam-makam wali seperti Makam Sunan Bonang dan Makam Ibrahim Asmoroqondi juga tidak dipungut retribusinya karena dalam pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto.

Dalam situasi ini, perlu dilakukan intensifikasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan di tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Di mana objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tuban yakni terdapat empat tempat wisata diantaranya Pantai Boom Tuban, Pemandian Bektiharjo, Goa Akbar, dan Museum Kambang Putih. Status pengelolaan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Dari empat wisata tersebut, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, hanya tiga tempat wisata yang merupakan objek wisata retribusi yakni Pantai Boom Tuban, Pemandian Bektiharjo, dan Goa Akbar. Sedangkan objek wisata Museum Kambang Putih merupakan objek wisata yang tidak berbayar. Objek wisata Goa Akbar juga merupakan objek wisata dengan jumlah pengunjung terendah dari dua objek wisata retribusi lainnya yakni Pantai Boom Tuban dan Pemandian Bektiharjo. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 4 Tabel Perbandingan Jumlah Pengunjung Tiga Objek Wisata Retribusi Milik Pemerintah Kabupaten Tuban

Objek Wisata	2021	2022	2023
Pantai Boom Tuban	27.369	55.050	95.297
Goa Akbar Tuban	15.937	27.031	30.293
Pemandian Bektiharjo	22.858	42.425	54.312

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Tuban, 2024

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1.4, terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 jumlah kunjungan pada tiga tempat wisata

milik Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut mengalami kenaikan. Akan tetapi, diantara tiga tempat wisata milik pemerintah Kabupaten Tuban, jumlah kunjungan yang paling sedikit adalah pada objek wisata Goa Akbar. Sedikitnya jumlah pengunjung tersebut memberikan dampak pada sedikitnya pendapatan yang dihasilkan sehingga memberikan kontribusi yang kecil bagi pendapatan asli daerah (PAD.), seperti pada data berita berikut.

Pantai Boom, rerata pendapatan per hari mencapai Rp 12,7 juta, kemudian Gua Akbar Rp 3,4 juta, dan Pemandian Bektiharjo Rp 7,4 juta.

Wawancara kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.

Sumber : Pendapatan Wisata Naik Empat Kali Lipat, tapi Belum Sebanding dengan Swasta - Radar Tuban (jawapos.com) (Diakses pada Sabtu, 27 Januari 2024)

Sedikitnya jumlah pengunjung objek wisata Goa Akbar tersebut yang berdampak pada kurangnya pendapatan yang dihasilkan untuk masuk pada pendapatan asli daerah (PAD) membuktikan bahwa pengembangan objek wisata tersebut belum optimal. Hal itu tidak selaras dengan tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037, yakni untuk meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.

Goa Akbar merupakan wisata alam dan sejarah yang letaknya strategis di belakang pasar umum Tuban. Goa Akbar adalah goa yang besar dan memiliki keunikan keberadaan stalaktit dan stalagmit yang memukau dalam beragam bentuk, serta sungai-sungai kecil yang mengalir melalui gua (Shinta, 2022). Selain itu, di

dalam Goa Akbar terdapat ruang-ruang dan ornamen batu dalam bermacam-macam bentuk dan mempunyai sejarah dibaliknya. Pada dinding sebelah utara pintu masuk Goa Akbar juga terdapat relief yang memiliki kisah sejarah yang berkaitan dengan Tuban seperti asal-usul Kabupaten Tuban, jasa-jasa dan wisuda Ronggolawe, Sri Huning Mustiko Tuban, perjalanan Sunan Kalijogo, dan meninggalnya ulama-ulama dan umarok.

Goa Akbar memberikan kontribusi yang sedikit dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah pengunjung wisata. Di mana data lapangan menunjukkan bahwa sedikitnya pengunjung wisata Goa Akbar dipengaruhi oleh kurangnya daya tarik wisata, promosi tempat wisata dan tempat wisata yang kurang terlihat oleh wisatawan luar kota serta lokasi jalan yang sedikit kumuh di depan gerbang masuk wisata karena berhadapan dengan para pedagang yang berjualan di pasar. Hal itu menunjukkan bahwa pengelola belum melaksanakan tugasnya dengan optimal. Sedangkan terkait dengan segi sumber daya berupa fasilitas, masih ada kekurangan dalam hal infrastruktur dan pelayanan. Hal itu dibuktikan dari observasi pra-riset, pada wisata alam Goa Akbar sudah terdapat adanya fasilitas pendukung seperti toilet, musholla, lampu untuk pencahayaan dalam goa. Akan tetapi, fasilitas tersebut masih kurang seperti akses parkir wisata Goa Akbar yang bercampur dengan parkir pengunjung pasar, kurangnya atraksi wisata dan tidak ada inovasi lain yang bisa menarik perhatian minat wisatawan. Hal itu didukung dengan pernyataan dari salah satu *staff* Goa Akbar.

“Fasilitas yang ada perlu diperbaiki dan ditambahkan suasana baru untuk menarik minat pengunjung.” Menurut Pita, pengelola Wisata Goa Akbar, ketika ditemui ditempat wisata pada Jumat, 7 April 2023.

Sumber : <https://solutif.id/kuranginya-perbaikan-wisata-goakbar-sepi-pengunjung/> (diakses pada Minggu, 8 Oktober 2023).

Data observasi pra riset juga menunjukkan bahwa di dalam Goa Akbar lantai-lantai di dalam lorong goa cenderung licin. Akan tetapi untuk menjaga keamanan objek wisata belum terdapat adanya petugas keamanan untuk mengawasi dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen petugas terhadap peningkatan layanan objek wisata.

Adanya permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata daerah. Apalagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana juga harus melakukan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ada supaya wisata dapat berkembang dengan baik dan terarah sehingga tujuan dari adanya kebijakan mengenai pengembangan pariwisata daerah tercapai. Dari hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata pada wisata Goa Akbar. Penelitian ini dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Teori implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn meliputi enam faktor yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar-organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Alasan menggunakan model teori tersebut dibanding dengan teori lainnya adalah karena model tersebut cocok untuk penelitian ini serta untuk mengetahui dengan rinci dan jelas tentang implementasi kebijakan yang dilakukan. Tidak hanya itu, dalam model ini

mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara berurutan dari pembuatan keputusan politik, pelaksanaan, hingga kinerja kebijakan publik (Agustino, 2022). Dari hal itu, peneliti mengambil judul **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Objek Wisata Alam Goa Akbar Di Kabupaten Tuban.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas, peneliti menemukan rumusan masalah penelitian yakni bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada objek Wisata Alam Goa Akbar Di Kabupaten Tuban?

1.3.Tujuan Penelitian

Dari penjelasan dalam latar belakang dan penemuan rumusan masalah, bisa didapati tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan dalam pengembangan objek wisata alam Goa Akbar di Kabupaten Tuban.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1.Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu bagi mahasiswa tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada objek wisata alam Goa Akbar di Kabupaten Tuban dan sebagai bahan masukan mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang penelitian yang relevan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Untuk bahan bacaan lebih lanjut yang dapat digunakan oleh peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait sebagai referensi.

b. Bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban

Sebagai bahan referensi dan diskusi maupun masukan terhadap program atau strategi yang akan dijalankan terkait dengan pengembangan pariwisata agar menghasilkan output yang baik dan sesuai seperti apa yang diharapkan.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan strategi pengembangan pariwisata dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik sejenis serta dapat menerapkan ilmu sudah dipelajari di Program Studi Administrasi Publik.